DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
PERNYATAAN KEASLIAN ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING iii
PENGESAHAN TIM PENGUJI iv
ABSTRAK v
KATA PENGANTAR vi
TRANSLETASI ix
DAFTAR ISI xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah 14
C. Rumusan Masalah 16
D. Tujuan Penelitian 17
E. Kegunaan Penelitian 17
F. Kerangka Teoritik 18
G. Penelitian Terdahulu 23
H. Metodologi Penelitian 26
I. Sistematika Pembahasan 30

BAB II KAJIAN TEORI KOMPETENSI DAN KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DAN MAHKAMAH AAGUNG, TATA URUTAN PERUNDANG-UNDANGAN, DAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH DALAM ISLAM

A. Teori Kompetensi 32
B. Teori Kewenangan 34
1. Kewenangan Mahkamah Konstitusi 36
a. Pengujian Undang-Undang *(Judcial Review)* 43
b. Sengketa Kewenangan Lembaga Negara 45
c. Pembubaran Partai Politik 47
d. Memberikan Putusan atas Pendapat DPR Mengenai Dugaan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pelanggaran oleh Presidendan/atau Wakil Presiden 50
e. Memutus sengketa Pemilu/Pemilukada 51
2. Kewenangan Mahkamah Agung 52
a. Menguji Undang-Undang dibawah Undang-undang 53
b. Mengadili Pada Tingkat Kasasi 54
c. Kewenangan lain yang diberikan oleh Undang-Undang 56
C. Teori Hierarki Norma Hukum dan Tata Perundang-undangan.....58
a. Teori *Groundnorm* 59
b. Tata urutan Perundang-Undangan.....64
c. Asas-Asas Pembentukan Perundang-undangan 69
D. Pemilihan Kepala Daerah atau Gubernur dalam Islam 71
BAB III PEMBAHASAN
PROSEDUR PELAKSANAAN PEMILUKADA DAN KOMPETENSI MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MENGADILI SENGKETA PEMILUKADA
A. Prosedur Pelaksanaan Pemilukada berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah dan Penyelesaian Sengketa Pemilukada berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2004 74
1. Prosedur Pelaksanaan Pemilukada berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.....74
a) Penyelenggara Pemilukada berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.....75
b) Tatacara Dan Mekanisme Pilkada UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.....77
2. Penyelesaian Sengketa Pemilukada berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintah Daerah 85
a) Penyelesaian sengketa Pemilukada oleh Mahkamah Agung 85
b) Penyelesaian sengketa Pemilukada oleh Mahkamah Konstitusi 91

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Kompetensi Mahkamah Konstitusi dalam mengadili sengketa Pemilukada setelah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota 97
1. Ikhtisar Putusan MK No. 97/PUU-XI/2013 97
2. Kompetensi Mahkamah Konstitusi dalam mengadili Sengketa Pemilukada berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota 114

BAB IV ANALISIS

A. Analisis Prosedur Pelaksanaan Pemilukada berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Penyelesaian Sengketa Pemilukada berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintah Daerah.....131
1. Analisis terhadap Prosedur Pelaksanaan Pemilukada berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah 131
2. Analisis terhadap Penyelesaian Sengketa Pemilukada Berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah 135
a) Analisis terhadap Penyelesaian sengketa Pemilukada Oleh Mahkamah Agung..... 135
b) Analisis terhadap Penyelesaian sengketa Pemilukada Oleh Mahkamah Konstitusi 141

B. Analisis Kompetensi Mahkamah Konstitusi mengadili Sengketa Pemilukada setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota ..... …….....146
1. Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013..... 146
2. Analisis Komptensi Mahkamah Konstitusi dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mengadili Sengketa Pemilukada dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota 157

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 169

B. Saran 171

DAFTAR PUSTAKA ……..173

LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id